

## **BAB II**

### **KONDISI SOSIAL POLITIK NEPAL**

Nepal, terletak di Himalaya, adalah sebuah negara di Asia Selatan yang berbatasan dengan Republik Rakyat Cina (Daerah Otonomi Tibet) di sebelah utara dan India di barat, timur, dan selatan. Negara Nepal dibentuk melalui Persatuan Nepal pada 21 Desember 1768. Prithvi Narayan Shah menjadi raja pertama. Nepal merdeka dari Inggris pada 21 Desember 1923. Sebelumnya, Negara yang terletak di Himalaya ini berstatus protektorat setelah dikalahkan Inggris dalam perang tahun 1815. Pada tahun 1990, Nepal mengubah sistem pemerintahan menjadi Monarki Konstitusional. Kemudian pada tahun 2008 kerajaan Nepal resmi dibubarkan dan Nepal berubah menjadi negara republik federal yang sekuler.<sup>10</sup>

#### **1. Geografi dan Demografi**

Meskipun luas wilayahnya kecil, negara Nepal memiliki lansekap yang bervariasi, mulai dari terai yang lembab di selatan sampai Himalaya yang tinggi di utara. Nepal memiliki delapan dari sepuluh puncak tertinggi dunia, termasuk Gunung Everest dekat perbatasan Tiongkok. Kathmandu merupakan ibu kota dan kota terbesar.

---

<sup>10</sup> Nepal dalam [www.id.wikipedia.org](http://www.id.wikipedia.org), diakses , 5 April 2009

Nepal nyaris berbentuk segi empat, dengan panjang 650 km dan lebar 200 km, dengan luas wilayah 147.181 km<sup>2</sup>. India mengelilingi Nepal di tiga sisi. Meskipun Nepal tidak berbatasan dengan Bangladesh, namun kedua Negara ini dipisahkan oleh tanah selebar 24 km saja. yang dikenal sebagai Leher Ayam. Nepal intinya terbagi tiga daerah fisiografik: Pegunungan, bukit, dan Daerah Terai.

Nepal, secara rasminya menurut perlembagaan Sementara dikenali sebagai Negara Nepal, adalah sebuah negara dikelilingi daratan di Himalaya, Asia Selatan yang menyempadani China (Tibet) di utara, serta India di selatan, timur, dan barat. Nepal ialah sebuah kerajaan yang mempunyai berbagai ciri geografi serta kebudayaan yang kaya. Melebihi 80% daripada penduduknya menganuti agama Hinduisme, ialah lebih banyak dari segi jumlah orang Hindu di India. Dengan itu, Nepal merupakan negara tunggal di dunia yang paling bersifat Hindu.

Bagi sebuah wilayah yang kecil, pandangan darat Nepal adalah amat berbeda dari Terai yang lembab di selatan hingga ke Himalaya yang tinggi mengawan di utara. Nepal mempunyai delapan dari 14 buah gunung yang tertinggi di dunia yang menjadi kemegahannya, termasuk Gunung Everest yang berbatasan dengan China. Kathmandu adalah ibu negara serta kota yang terbesar. Kota-kota besar utamanya yang lain termasuk Bharatpur, Biratnagar, Bhairahawa, Birgunj, Janakpur, Pokhara, Nepalgunj, dan Mahendranagar.

Asalnya nama Nepal tidak pasti, tetapi pemahaman yang paling umum ialah perkataan ini berasal daripada Ne (suci) dan pal (gua).

## 2. Sejarah Nepal

Sejarah yang panjang memperlihatkan kawasan Nepal dipecahkan dan kemudian digabungkan kembali oleh kekuasaan monarki absolut pada masa-masa sebelumnya. Nepal menjadi sebuah negara dengan raja sebagai simbol Negara baru berlangsung pada tahun 1990. Bagaimanapun, kekuasaan monarkinya mengekalkan banyak kekuasaan yang sewenang-wenang dan tidak ada batasan. Dengan berangsur-angsur Nepal menjadi Negara yang lebih menuju pada pemerintahan konstitusional. Keadaan ini ditandai dengan ketidakstabilan yang semakin meningkat, baik raja dan parlemen bekerja sama sejak dari tahun 1996 di banyak wilayah Negara yang telah diperangi oleh pemberontak-pemberontak Maoisme. Para pemberontak Maoist yang dibedakan dalam partai-partai politik membentuk aliran, terutama gerakan bawah tanah untuk memulai sebuah perang gerilnya demi menentang timbulnya kembali monarki absolut. Mereka berharap dapat menggulingkan institusi-institusi feodal, termasuk monarki, serta pembentukan sebuah negara Maoisme. Ini mengakibatkan Perang Saudara Nepal yang mengorbankan lebih 13.000 orang.<sup>11</sup>

---

<sup>11</sup> Dahal, Dev Raj. "Trade Union Situation in Nepal," nepaldemocracy.org, 2003.

Nepal pertama kali melakukan diplomasi ketika pada tahun 14 Desember 1955. Saat itu Nepal resmi menjadi anggota PBB, untuk Nepal yang hanya Negara kecil dan lemah di kawasan Asia Selatan. PBB merupakan wadah yang tepat dalam rangka memperbaiki perekonomian negara ini melalui lembaga-lembaga atau program-program yang telah ditetapkan oleh PBB. Dan juga sebagai pembuka jalan yang lebih lebar agar terciptanya kerjasama-kerjasama yang mungkin terjadi antara Nepal dengan Negara-negara lainnya.

## **A. Kondisi Sosial dan Ekonomi**

### **1. Kondisi Perekonomian**

Nepal adalah negara pertanian. 80% penduduk terutama mengerjakan pertanian. Ekonominya terbelakang, merupakan salah satu negara yang paling tidak maju di dunia. Tanaman utamanya adalah padi, jagung dan gandum, sedang tanaman ekonominya adalah tebu, bahan minyak dan tembakau. Kaya dengan sumber daya tenaga air, potensi pembangkitan listrik tenaga air tercatat 83 juta kilowatt, kira-kira menempati 2,3% potensi dunia. Dasar industrinya lembah dan berskala kecil, tingkat mekanisasinya rendah dan berkembang lambat. Iklimnya nyaman dan pemandangan alamnya yang indah, dengan ini Nepal memiliki sumberdaya wisata yang kaya. Selain itu Nepal juga kaya dengan warisan kebudayaan, agama dan bangunan klasik yang indah.

Angka populasi negara ini 28.901.790 (pada Juli 2007. Struktur Usia mereka adalah Usia 0-14 tahun: 38% ( Pria 5.721.720, sedangkan wanitanya 5.360.391), Usia 15-64 tahun: 57.9% (pria 8.597.037, sedang wanitanya 8.134.115), Usia 65 keatas : 3.8% (pria 528.123 dan wanitanya 560.414) Angka rata-rata pertumbuhan penduduknya sekitar 2.13 % pertahunnya. Angka Rata-rata kelahiranya 30.46/1000 populasi. Sedangkan angka kematiannya 9.14/ 100 populasi. Etnis yang ada di Nepal antara lain; Chhetrti 15.5%, Brahman-Hill 12.5%, Magar 7%, Tharu 6.6%, Temang 5.5%, Newar 5.4%, Muslim 4.2%, dll. Agama yang ada di Nepal adalah Hindu 80%, Budha 10.7%, Muslim 4.2% dll. Bahasa sehari-hari yang digunakan Bahasa Nepal.<sup>12</sup>

## **2. Gerakan Masyarakat Adat di Nepal**

Nepal adalah negara yang mempunyai kondisi geografis dan keragaman budaya luar biasa. Keragaman budaya dari negara yang berbentuk Monarki Konstitusional tersebut tercermin pada Pasal 4 Konstitusi 1991, yang mengatakan bahwa Nepal adalah Negara yang multi-etnik, multikultural dan multi-linguistik. Namun pengakuan oleh konstitusi tersebut sama sekali tidak menjadi sebuah realitas politik dalam kehidupan sehari-hari. Keberagaman budaya masyarakat kemudian menjadi sebuah isu yang "dilawan" oleh kebijakan yang ada. Misalnya, pemerintah kerajaan Nepal memberlakukan

---

<sup>12</sup> Laporan International Observer di Nepal bersama Asian Network for free election (ANFREL), 2007

stratifikasi sosial melalui sistem kasta, menjadikan bahasa Nepal (khas Nepali) sebagai satu-satunya bahasa resmi, dan Hindu dijadikan satu-satunya agama resmi.<sup>13</sup>

Dampak dari praktek tersebut adalah meluasnya diskriminasi etnik, kasta dan gender, yang selanjutnya menghancurkan identitas budaya komunitas-komunitas asli. Hal ini tentu dapat dilihat sebagai bentuk hilangnya atau tidak dioptimalkannya potensi modal sosial masyarakat adat akibat hancurnya bahasa dan agama-agama asli mereka.

Ada 59 komunitas asli (dalam bahasa Nepal: Janajati) yang sudah diakui dan populasi mereka sekitar 37.2% dari 23.4 juta penduduk Nepal. Komunitas-komunitas asli ini berasal dari beberapa kelompok suku pengembara, masyarakat adat sekitar hutan dan petani. Dari komposisi populasi tersebut, berdasarkan sensus terakhir dan merujuk pada hasil survei standar hidup, menunjukkan kenyataan bahwa komunitas asli tersebut sebagian besar merupakan kelompok masyarakat miskin, rentan terhadap marginalisasi dan terlantar.

Namun di tengah situasi politik yang tidak menguntungkan bagi eksistensi komunitas asli Nepal tersebut, masih terdapat organisasi yang

---

<sup>13</sup> Mario Diani argues, "A social movement Nepal is a network of informal interactions between a plurality of individuals, groups and/or organizations, engaged in political or cultural conflict, on the basis of a shared collective identity" (2002:165). May 22, 2007

mengambil peran strategis untuk mendorong perubahan sosial bagi kehidupan komunitas asli Nepal. Organisasi itu bernama NEFIN (*The Nepal Federation of Indigenous Nationalities*), sebuah organisasi yang beranggotakan komunitas-komunitas asli Nepal. Organisasi ini adalah organisasi payung berbentuk federasi dan berdiri pada tahun 1991. NEFIN menjadi satu-satunya organisasi yang diakui keabsahannya oleh pemerintah. Secara umum cita-cita organisasi ini adalah mendorong upaya pengakuan atas berbagai bentuk keragaman bahasa, agama dan budaya komunitas asli Nepal, dan membantu komunitas asli untuk memperjuangkan kebutuhan mereka secara berkelanjutan.

Dalam struktur organisasinya, NEFIN mempunyai sebuah dewan yang terdiri dari perwakilan semua komunitas anggotanya. Setiap komunitas mempunyai perwakilan 1 orang yang duduk sebagai anggota dewan. Dewan mempunyai 9 posisi kantor yang berotasi di antara anggota organisasi disusun menurut abjad. Pelaksana harian organisasi dikendalikan oleh Sekretaris Jendral yang dibantu 7 sekretaris yang bertanggung jawab atas beberapa departemen. Rapat majelis umum (kongres) dilaksanakan tiap 3 tahun sekali untuk memilih Sekretaris Jendral, merumuskan dan menetapkan Statuta serta menetapkan Garis-Garis Perjuangan Organisasi.

## **B. Kondisi Sosial Politik**

Kondisi suatu negara tidak terlepas dari keadaan dalam negeri negara tersebut yang dipengaruhi oleh faktor sosial ekonomi, sosial politik maupun sosial budaya. Kondisi politik yang stabil dapat menciptakan negara tersebut stabil dan dapat menjalankan roda pemerintahannya dengan baik.

Kondisi Nepal yang dalam perjalannya sejarahnya pernah mengalami pasang surut karena terjadinya perubahan sistem pemerintahan akibat ketidakstabilan politik yang mengakibatkan terjadinya beberapa kali pemberontakan yang dilakukan oleh kelompok komunis.

### **1. Pemerintahan**

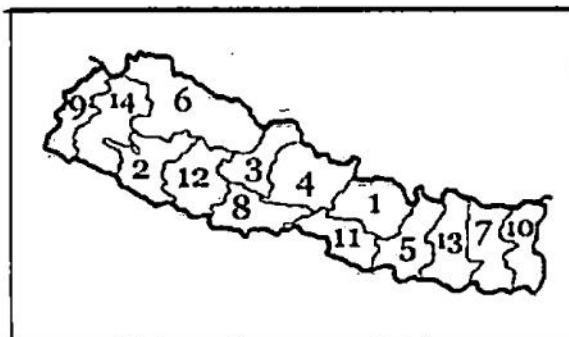
Hingga tahun 2006 Nepal merupakan satu-satunya kerajaan Hindu di dunia. Pada tahun 2006 parlemen Nepal menyatakan Nepal diubah menjadi Negara sekuler. Pada 28 Mei 2008, Nepal mengganti sistem pemerintahannya dari kerajaan yang sudah bertahan selama 250 tahun menjadi republik sehingga secara resmi nama "Kerajaan Nepal" pun berubah menjadi "Republik Nepal".

Nepal terbagi menjadi 14 zona dan 75 distrik yang dikelompokkan menjadi lima zona pengembangan. Setiap distrik dikepalai oleh kepala distrik bertanggung jawab untuk menjaga hukum dan ketertiban serta mengkoordinasi kerja dinas-dinas pemerintah. Nepal dibagi menjadi beberapa zona dan divisi, yaitu :



1. Bagmati
2. Bheri
3. Dhawalagiri
4. Gandaki
5. Janakpur
6. Karnali
7. Kosi
8. Lumbini
9. Mahakali
10. Mechi
11. Narayani
12. Rapti
13. Sagarmatha
14. Seti

Gambar.1 Pembagian Zona Nepal



Divisi:

1. Barat Jauh: Mahakali (9), Sethi (14)
2. Barat Tengah: Karnali (6) Bheri (2), Rapti (12)
3. Barat: Dhawalagiri (3), Gandaki (4), Lumbini (8)
4. Pusat: Bagmati (1), Janakpur (5), Narayani (11)
5. Timur: Sagarmatha (13), Kosi (7), Mechi (10)

Geopolitik Nepal yang menempati bagian pusat Asia terletak di antara dua Negara dengan teknologi yang super canggih. Negara Cina berada di utara dan India di timur, selatan dan barat. Ini menjadikan Nepal berpotensi sebuah transit untuk koridor Cina-India yang dapat meningkatkan persaingan untuk perdagangan dan ekonomi. Lokasinya secara geopolitik bagian bawah dari daratan Cina, geografi yang demikian merupakan strategi penting untuk keamanan mereka, stabilitas, kemajuan dan perdamaian. Semakin terbuka dan demokratis Nepal di masa mendatang akan lebih mungkin tergoyang oleh geostrategis kompetisi di antara mereka yang memiliki wewenang untuk mempengaruhi mereka.

Globalisasi akan berkembang dengan sejarah dan kekuatan mendenasionalisasikan mereka atas dasar hubungan pilihan sendiri, bangsa ini akan menjadi sebuah situs dari konflik internal elit memelihara oleh geostrategis dari pengaruh konflik eksternal dan internal dalam pencarian sekutunya. Keberadaan lebih dari dua lusin kelompok pemberontak di Tarai, Nepal dari dataran selatan, dan simmering krisis di Tibet melibatkan tiang



pula, keamanan internal telah dijaga secara kuat dari pada politik Nepal melalui penegakan perdamaian yang sesuai dalam konteks, pemahaman geopolitik sangat penting untuk menjaga yang seimbang kebijakan asing dan keamanan negara.

Nepal sebagai bagian dari masyarakat sosial, ekonomi dan teknologi mempengaruhi melampaui domain dari status sebagai negara bagian kepada kedaulatan wilayahnya, ada sebuah keharusan untuk melihat keamanan melebihi pertahanan nasional sebagai perencanaan pembangunan pertahanan dan kebutuhan yang kompetitif. saat ini kebutuhan manusia ditentukan oleh ideologi yang universal dari manusia hak, demokrasi, keadilan sosial dan perdamaian.

Mereka telah hidup berdampingan dan kehidupan global dengan bangsa lainnya. Dalam konteks ini, kerja sama internasional adalah penting untuk meniadakan hubungan negara dengan dunia yang ada di berbagai tingkat keamanan, sub-nasional, negara bagian, regional dan internasional dan mendorong sistem norma dan berbasis kesesuaian dan tindakan kolektif. Pemerintahan berfungsi dengan baik dan yang terpenting kesesuaian antara efektif serta kewenangan yang dimiliki oleh masyarakat dari lembaga-lembaga pemerintahan dan perilaku yang harus dijaga atau lebih dari nilai-nilai masyarakat.<sup>14</sup>

---

<sup>14</sup> Webersik, Kristen dan Manish Thapa. 2008. "Nepal: Perubahan Iklim dan Keamanan Factsheet," Tokyo: United Nations University.

## **2. Nepal dalam periode gejolak politik**

Lebih dari satu dekade terakhir, situasi politik Nepal mengalami gejolak. Ketidakstabilan politik dipicu perilaku pemerintahan yang otoriter sehingga eskalasi perlawanan kelompok gerilyawan Maois yang menyatakan perang dan angkat senjata pada 13 February 1996 terhadap pemerintah Kerajaan Nepal. Bahkan jika di telisik ke belakang, sebelum kelompok gerilyawan menyatakan perang, gejolak politik sering melanda Negara yang berada diantara 2 raksasa Asia (Cina dan India) ini. Sejak 1991, hampir tidak ada rezim pemerintahan yang bertahan lebih dari 2 tahun. Gejolak seperti ini tentunya berdampak juga pada kehidupan masyarakat adat Nepal.

Secercah harapan sempat timbul pada tahun 1990, ketika terjadi perubahan pada bentuk Negara, dari bentuk Negara Monarki Absolut (kerajaan mutlak) ke bentuk Monarki Konstitusional (kerajaan berlandaskan konstitusi). Kekuasaan dan kebijakan yang sebelumnya mutlak berada di tangan Raja dalam sistem Negara Monarki Absolut kini di ambil alih Konstitusi. Semua kebijakan dan peraturan harus berlandaskan Konstitusi. Situasi ini pada awalnya dianggap sebagai sebuah kemajuan bagi demokrasi, dimana ada ruang terbuka bagi masyarakat sipil di Nepal termasuk masyarakat adat untuk mengembangkan seluruh sumber daya dan potensinya.

Kenyataannya, ruang demokrasi itu tidak benar-benar terbuka, karena Raja masih mempunyai kekuasaan besar untuk memberangus demokrasi, misalnya membubarkan parlemen dan pemerintahan yang terpilih melalui

pemilihan umum. Hal ini berlangsung sepanjang 1990-an dan memuncak pada masa kekuasaan Raja Gyanendra yang membubarkan parlemen dan pemerintahan pada 4 Oktober 2002. Bahkan setelahnya, Raja Gyanendra melakukan “kudeta” terhadap pemerintahan yang sah. Pada 1 Februari 2005, Raja Gyanendra mengambil alih seluruh kekuasaan politik dan administrasi Negara, demokrasi pun sekarat. Hak-hak sipil dan politik rakyat kembali diberangus oleh Raja.

Namun perkembangan yang buruk tersebut tidak mengendurkan perlawanan masyarakat sipil. Malah sebaliknya perlawanan bersenjata yang dilancarkan kelompok gerilyawan *Comunist Party of Nepal (CPN)-Maoist* semakin meluas dan membesar kekuatannya. Kelompok perlawanan bersenjata Maois menjadikan areal pedesaan sebagai basis perjuangannya dengan metode gerilya. Banyak anggota komunitas asli Nepal yang bergabung ke dalam CPN-Maoist. Bahkan CPN-Maoist menjadikan persoalan masyarakat adat sebagai bagian perjuangan politik utama mereka. Menurut Stella Tamang, ada 5 persoalan besar yang diusung masyarakat adat dan didukung oleh CPN-Maoist, yakni :

1. Pembentukan negara sekuler, kesetaraan hak untuk bahasa, budaya, pendidikan, informasi dan pembangunan.
2. Restrukturisasi kekuasaan politik.
3. Hak untuk menentukan nasib sendiri dan otonomi seluas-luasnya.

4. *Affirmative action* (keuntungan pada golongan tertentu) dibidang pendidikan, birokrasi dan kesehatan.
5. Partisipasi dalam proses pengambilan keputusan, dari perencanaan hingga pelaksanaannya.<sup>15</sup>

Lebih jauh menurut Luisang Waiba Tamang, CPN-Maoist sudah membangun "Otonomi Pemerintahan Rakyat" yang menyesuaikan otonomi tersebut dengan peta etnis dan tanah leluhur di tingkat regional. Mereka mendeklarasikan pembentukan 6 region otonom berbasis etnis di Tamang, Tharu, Limbu, Gurung dan Newar.

Sementara itu, ditengah berkecamuknya konflik bersenjata NEFIN mengambil posisi strategis dengan melakukan pendidikan politik secara terbuka terhadap masyarakat adat. NEFIN membangun kesadaran masyarakat adat dengan sistematis. Hasilnya dapat dilihat dari gencarnya aksi-aksi protes melalui kekuatan massa terhadap kebijakan pemerintah di Kathmandu sebagai pusat kekuasaan politik. NEFIN tak putus-putusnya menyerukan kepada pemerintah, partai politik dan komunitas internasional untuk tidak mengabaikan partisipasi masyarakat adat dalam upaya membangun perdamaian di Nepal. Karena, masyarakat adat adalah kelompok yang terkena dampak langsung dari konflik bersenjata.

---

<sup>15</sup> McAdam, Doug, Sidney Tarrow and Charles Tilly. 1999. "Toward an Integrated Perspective on Social Movements and Revolution in Nepal," eds. Mark Irving Lichbach and Allan S. Zukerman, *Comparative Politics: Rationality, Culture and Structure*, Cambridge: Cambridge University Press.

NEFIN kemudian mendesak pemerintah untuk segera: 1. mengakui identitas dan hak masyarakat adat. 2. memasukkan partisipasi aktif dan penuh mereka dalam proses pembangunan perdamaian. NEFIN juga meyakini bahwa struktur negara saat ini tidak efektif, diskriminatif dan eksklusif. Sehingga kekerasan yang ada merupakan akibat dari persoalan struktur negara. Sehingga NEFIN dengan jelas dan tegas mendesak dilakukannya restrukturisasi Negara. NEFIN juga meluaskan perjuangannya pada level internasional dengan membangun jaringan untuk kampanye internasional. Hal itu terlihat ketika isu masyarakat adat Nepal dijadikan sebagai laporan khusus pada Forum Permanen PBB untuk isu masyarakat adat, pada Mei 2005.

### **3. Mengubah Pola dan Stabilitas di Nepal**

Lembaga politik Nepal saat ini sedang mencari jati diri pada komitmen untuk menuju pada kedaulatan, berfungsinya parlemen, supremasi politik dan keterbukaan. Namun, siklus proses politik di Nepal saat ini sedang bergejolak menuntut pergantian suksesi kepemimpinan yang telah diwariskan secara budaya yang turun temurun. Kelembagaan politik di Nepal Sangat miskin pengalaman dan tidak memiliki batas-batas yang jelas antar lembaga negara dengan masyarakat. Sampai hari ini dari perpaduan yang ada secara terus menerus lembaga negara, seperti kerajaan, tentara, polisi, birokrasi, dan aparat hukum terjadi kesenjangan dengan lembaga sipil.

Kekuasaan otoriter membuat kurangnya keseimbangan antara negara dan masyarakat dalam menciptakan budaya bangsa. Tapi, aparat keamanan

negara tadi telah menyatakan kesetiaan mutlak kepada raja, semua di bawah kekuasaan rezim monarki, kekuasaan, oligarki, dan bahkan kebebasan diselenggarakan dan dipimpin rezim komunis dan membantu untuk mempertahankan keamanan dan kesatuan bangsa melalui negara-semua menjaga agar keamanan dan politik tetap terjaga. Mereka sepakat untuk tetap loyal, disiplin, patriotisme yang telah mereka tunjukkan di luar negeri dan menjaga misi perdamaian.

Keamanan didasarkan pada kebijakan aktif pertahanan. *The advent of Rana* tahun 1846 dimodifikasi dalam rezim kebijakan ini karena dipelihara khusus hubungan keamanan dengan British India dan sisanya dari isolasi dunia. Tetapi, konsep Menurut Robert A. Scalapino kelembagaan politik adalah suatu proses dimana struktur politik adalah operasional dilakukan sesuai dengan peraturan dan prosedur yang telah ditetapkan, sehingga lebih mengatur, maka dapat diramalkan bahwa pola perilaku politik, akan mentrasfer dan memberikan landasan yang efektif pada kebijakan pengembangan serta penerapan keadilan.<sup>16</sup>

Nasional dan otonomi budaya diri dari berbagai kelompok yang tidak sepenuhnya terkunci. Nepal dari sistem politik tradisional tergabung eksekutif, legislatif dan kehakiman fungsi menjadi satu, sentralisasi dilakukan karena struktur tumpang tindih fungsi walaupun ada persamaan dari sistem peradilan.

---

<sup>16</sup> Foucault, Michel. 2000. "The Subject and Power," Nash, Kate ed. 2000. *Readings In Contemporary Political Sociology*, Oxford: Blackwell Publishers Ltd.



Polisi dapat mengatasi keadaan masyarakat, tentara keamanan juga memberikan perlindungan dan menyediakan sumber-sumber budaya lokal dan internasional.

Legitimasi berdasarkan tradisi dan akan dapat meminimalisasi stabilitas keamanan, stabilitas, pendapatan dan resolusi konflik. Inovasi yang modern dari undang undang negara pada tahun 1950 memperluas partisipatif masyarakat, masyarakat sebagai sumber daya menunjukkan kapasitasnya untuk tindakan bersama memberikan legitimasi dan membendung dari tuntutan, pemilihan, kinerja dan internasional. Yang demokratis percobaan dari tahun 1950-an kemudian ukuran dan memperluas cakupan negara karena kebutuhan untuk melakukan banyak fungsi kesejahteraan. Negara mengadopsi kebijakan diversifikasi dalam hubungan internasional. Selama 1960-1990 periode, alasan negara memegang kedudukan atas hak-hak sipil dan negara dan warganegara bertindak sebagai wali dari beragam masyarakat. Pendidikan umum, komunikasi, kesehatan dan ekonomi dari mediasi negara mitra masyarakat dan membantu untuk mempertahankan sebuah rezim kebijakan memperlabar jarak dalam geopolitik regional dan global.

Mengikuti keberhasilan gerakan demokrasi untuk setelah 1990 rezim yang berkuasa, Namun, dari hubungan negara dan masyarakat melalui privatisasi, denasionalisasi, deregulasi turun takhta dan globalisasi dan kebijakan tanggung jawab dalam nikmat dari kekuatan-kekuatan pasar. Itu penarikan dari negara dan masyarakat menciptakan keamanan kekosongan

kekuasaan dan memulai pemberontakan. Kejahatan merupakan perangkap kemiskinan yang banyak dan sumber daya untuk beberapa monopoli sehingga memicu siklus kekerasan dan perlawanan, pelanggaran hak asasi manusia, deklarasi keadaan darurat yang demokratis oleh pemerintah dan imigrasi kaum muda di luar negeri untuk menangkai mata pencaharian dan krisis yang sedang dirancang takut ke dalam perang saudara. Ini langkah-langkah memberikan manfaat dari lembaga-lembaga demokratis masyarakat madani, partai politik dan parlemen dan dibangkitkan peran badan-badan keamanan dalam penyelesaian konflik. Jika konflik yang dikelola melalui kekerasan, maka kekerasan menjadi lembaga yang lebih kuat dan mereka akan terus menerus melakukannya untuk mencapai tujuan yang dimaksud.<sup>17</sup>

#### **4. Modernisasi dan Mekanisme Keamanan Publik**

Modernisasi sektor keamanan melibatkan profesionalitas badan-badan keamanan, rasionalisasi dan demokratisasi kewenangan mereka, antara pemerintah dan lembaga-lembaga yang menjadi tanggung jawab bagi kelompok masyarakat umum melalui proses hukum.

Sensitivitas untuk kemanusiaan hukum merupakan aspek penting dari demokratisasi. Yang cedera antara Maoist dari konsep reformasi sektor keamanan (SSR) dan non-Maoist gagasan demiliterisasi, demobilisasi dan reintegrasi (DDR) dari pejuang di bangsa produktif hidup harus diselesaikan

---

<sup>17</sup> Giddens, Anthony, 2000. *"The Social Revolutions of Nepal,"* Nash, Kate ed. 2000. *Readings in Contemporary Political Sociology*, Oxford: Blackwell Publishers Ltd

dengan bersemangat, jangka panjang dan strategi yang rasional yang saling memepererat, profesionalisasi dan relatif aman otonomi lembaga agar mereka melayani masyarakat umum dan kepentingan nasional. DDR yang dikaitkan dengan proses perdamaian dan pembatalan dari segala jenis non-Negara dari kekerasan politik saat ini terhubung ke SSR lokal yang dimiliki lebih luas pembangunan, pelatihan dan peningkatan kapasitas demokratisasi dan badan-badan keamanan umum. Keduanya bertujuan untuk meniadakannya kekebalan budaya dan negara alam. Penciptaan sebuah antarmuka antara sipil keamanan dan kelompok-kelompok masyarakat seperti polisi (Shrestha, 2004:438-461), yang dapat membarui lagi gambar badan keamanan sehingga menawarkan bantuan, rehabilitasi dan perdamaian di daerah.

Konsep pengawasan demokratis tidak pernah dilakukan di Nepal, karena kurangnya politik, keuangan kendala, antar lembaga koordinasi dan komunikasi dan tanpa keahlian untuk melakukannya. Tetapi, hal ini penting untuk menghapus antara keamanan dari atas dengan nasionalisme dari partai politik dan demokrasi lebih leluasa dibandingkan dengan demokrasi dan nasionalisme membuat hubungan antara keduanya demokrasi dan nasionalisme membuat lembaga ini bertanggung jawab kepada warga Negara berdaulat.

Ada juga perlu kekuatan lintas dan meningkatnya modal sosial di tingkat antar-lembaga sehingga untuk mengatasi permasalahan dari tindakan kolektif dalam menjaga keamanan dan supremasi hukum. Samuel P.

Huntington telah mengembangkan konsep empat pusat sebagai pengukuran dan ketahanan negara berfokus pada tingkat yang sistem politik adalah penyesuaian, keberagaman, dan otonomi. Ini adalah langkah-langkah penting untuk kelembagaan partai politik dan badan-badan keamanan di Nepal. Krisis manajemen dan struktural transformasi memerlukan kemampuan negara untuk memperbaiki akar penyebab konflik dan membuat struktur yang memenuhi standar kebutuhan manusia dan keamanan. Kunci untuk masa depan keamanan nasional adalah kelompok sipil dan keamanan bersama pada kegiatan di bidang umum dan kepentingan nasional, termasuk pengembangan demokrasi stabil budaya politik responsif terhadap kebutuhan masyarakat serta kelestarian lingkungan yang berubah terus menerus yang disebabkan oleh kekacauan politik.<sup>18</sup>

Struktur militer di Nepal adalah hanya ada dua bentuk yaitu Tentara Nepal dan Pasukan Kepolisian Nepal. Untuk menjadi tentara atau kepolisian Nepal harus berusia minimal 18 tahun. Angkatan bersenjata di Nepal rata-rata berumur, untuk pria usia 18-49 berjumlah 6.107.091; untuk wanitanya usia 18-49 berjumlah 3.744.389.

Anggaran dari pemerintah Nepal untuk militernya sebanyak 1.6% dari pendapatan nasionalnya. Angka tersebut kecil sekali mengingat juga rendahnya pendapatan nasional dari Negara ini. Ini adalah pusat aspek hukum

---

<sup>18</sup> Calhoun, Craig. 2000. " *New Social Movements of the Early Nineteenth Century*," Nash, Kate ed. 2000. *Readings in Contemporary Political Sociology*, Oxford: Blackwell Publishers. Ltd.

menciptakan ketertiban umum di mana berbagai aktor menerima aturan sosial dan melakukan saling melakukan akuntabilitas. Strategi utama adalah:

- a. Alasan Negara menetapkan bahwa monopoli sah pada prasyarat untuk mempertahankan warga negara dari ancaman luar dan kinerja fungsi pemerintahan. Tanpa yang kuat, kompak disiplin dan keamanan struktur negara yang demokratis dan tidak dapat melindungi warga Negara dari gangguan eksternal dan konflik internal serta melakukan kebijakan pembangunan nasional.
- b. Modern demokrasi membutuhkan keunggulan dari kontrol sipil (parlemen dipilih dan pemerintah) atas komponen terutama pada masalah-masalah keamanan pengeluaran, maka disposisi struktur, kontrol atas promosi internal, jenis teknologi militer yang akan diperoleh, pembelian peralatan, tugas militer, doktrin dan strategi keamanan. Di Nepal adalah penting untuk memisahkan tanggung jawab yang jelas antara *Nepal Army*, APF, Polisi dan Badan intelijen untuk menentukan masing-masing dari kekuasaan hukum lain dan mendirikan kelompok keamanan pemerintahan.
- c. Institusionalisasi dari sipil-keamanan adalah mitra penting bagi koordinasi dan sinergi dari tugas dan mencegah kebangkitan militerisme terjadi di masyarakat (kelompok-kelompok bersenjata, militan sayap pemuda dan radikalisme di partai politik) tingkat. Institusionalisasi membantu mendapatkan legitimasi untuk kepentingan sisi - partai politik dan badan-badan keamanan, membentuk hubungan dengan politik struktur dan

Keadaan masyarakat sipil dan keamanan adalah hubungan pusat untuk meningkatkan keamanan nasional di Nepal dan berkontribusi untuk nasional mencapai tiga tugas negara, termasuk demokrasi yang baru berdasarkan sosial kontrak dan perdamaian yang berkelanjutan berakar pada realisasi keamanan manusia. Tapi, ini membutuhkan kepemimpinan politik untuk menghapus lima cacat demokrasi, seperti akses ke publik daya, penolakan lawan kelompok mengklaim, monopoli, membatasi dan mempersempit kekuatan politik pendapat dan demokratis akan formasi dan modus yang melanggar aturan dasar nilai-nilai demokratis.<sup>19</sup>

Pembetulan yang cacat demokrasi dan demokratisasi badan keamanan harus disertai dengan formulasi doktrin keamanan nasional, kelembagaan dari dialog reguler dan identifikasi sumber ancaman oleh berbagai pihak masyarakat, dan memperkuat Dewan Keamanan Nasional melalui antar tim ahli dikoordinasikan oleh Kementerian Pertahanan dan yang juga dapat memberi tahu tentang peringatan dini dari kesalahan. Konflik dan menyarankan langkah-langkah awal untuk respon. Saling menghargai satu sama lainnya dari peran dan tanggung jawab antara masyarakat dan aparat keamanan sangat penting bagi pembangunan pasca konflik Nepal dan membangun bersama, damai di masa depan.

---

<sup>19</sup> Meyer, Thomas. 2004. *Militer dan Demokrasi*, Jakarta: FES.